

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan acuan dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peneliti – peneliti sebelumnya. Berikut beberapa peneliti terdahulu terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Benny Rachan Adang Agustiawan dan Wahyui (2018) Efektifitas dan prospektif pelaksanaan program beras sejahtera(Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai	Untuk mengetahui efektifitas dan prospektif pelaksanaan program beras sejahtera rastra dan Bantuan Pangan Nontunai	Kualitatif	Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T tepat sasaran, tepat jumlah , tepat waktu tepat administrasi , tepat harga, tepat kualitas) dan merumuskan sarana kebijakan perbankan pelaksanaan Rastra dan BPNT cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing – masing pelaksana program
2.	Ibnu Sazime Arief (2017) Evaluasi pelaksanaan program raskin di kelurahan	Mengetahui evaluasi pelaksanaan program raskin di kelurahan	Kualitatif	Hasil penelitian terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin , terlihat dari waktu penyaluran raskin yang tidak dilaksanakan setiap

	maharatu kota pekan baru	maharatu kota pecan baru		bulannya, jumlah raskin yang diterima RTM hanya 5-10 kg setiap periode penyaluran tidak tersedianya anggaran dalam penyaluran raskin karena tidak memiliki identitas sebagai warga kelurahan Maharatu dan masih ada nepotisme yang terjadi dalam pendapatan RTM sebagai penerima raskin
3.	Imal Alimah Akmal (2020) Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam rangka meningkatkan sekesahteraan masyarakat pra sejahtera di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa	Untuk mendeskripsikan implementasi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) melalui warung di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa	dskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai maksimal karena terdapat masalah pada mesin edc sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan
4.	Eko Yudianto Yunus .(2019) Implemestasi Program Bantuan Pangan Nontunai Di kecamatan Kanigaran Probolinggo	Untuk menganalisis implementasi program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Kanigaran Probolinggo	Kualitatif deskriptif	Faktor penentu implementasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.
5.	Ristiana Pramesti , Adji Suradji Muhammad,	Untuk mengetahui implementasi Bantuan	Deskriptif kualitatif	Standar dan tujuan kebijakan kurang optimal dapat dilihat dari tujuan yang dicapai belum

	Dian Prima Safitri .(2019) Implementasi Bantuan Pangan Nontunai melalui elektronik gotong royong dikota tanjungpinang	Pangan Nontunai (BPNT) melalui elektronik warung gotong royong e warung kota Tanjungpinang serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi e warung dalam mendistribusikan BPNT dikota Tanjungpinang		maksimal dalam memberdayakan KPM, Sumber dana yang ada kurang berjalan yakno para pelaksana dan sarana prasarana masih memiliki hambatan
6.	Selli Marsela(2020) sistem akuntansi pencairan dan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) pada dinas sosial kabupaten kuantan singingi	untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.	kualitatif	hasil penelitian ini Dinas Sosial sudah melakukan sistem pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan baik.
7.	Fany Rahmawati (2020) akuntabilitas penyaluran bantuan sosial program	untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran bantuan sosial	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH Kota Surakarta sudah akuntable, namun ada beberapa indikator yang masih kurang belum akuntable seperti

	keluarga harapan	berupa Program Keluarga Harapan dimana bantuan sosial tersebut dinaungi langsung oleh Dinas Sosial.		ketepatan sasaran dan pemutakhiran data.
--	------------------	---	--	--

Dari penyelasan tabel 2.1. maka ditarik simpulan bahwasannya pada penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan dari suatu program, efektivitas BPNT dalam menangani kemiskinan. Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukannya penelitian serupa mengenai pelaksanaan evaluasi Program BPNT khususnya di Kecamatan Bandarkedungmulyo.

Kerenanya peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian mengenai Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo, dapat teratasi dengan baik guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BPNT untuk memberikan dukungan pada keberhasilan pelaksanaan pada tahun tahun setelahnya secara berkelanjutan. Harapannya program BPNT dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memilih kualitas komoditi yang baik khususnya di Kecamatan Bandarkedungmulyo.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk Nontunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang e-warung yang bekerja sama dengan Bank penyalur. Penyaluran program bantuan pangan secara tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran Nontunai. Mulai tahun 2018 subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian mulai tahun 2018 bantuan pangan akan disalurkan ke masing – masing kabupaten / kota dalam bentuk Nontunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten atau sarana dan prasarana penyaluran Nontunai belum memadai, tetap menyalurkan rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).

Keberhasilan program Bantuan Pangan Nontunai diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) maka mekanisme pelaksanaan harus dilakukan dengan baik dan benar.

A. Tujuan, Manfaat Dan Besaran Manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Tujuan program BPNT yaitu sebagai berikut:

- a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan
- b) Memberikna gizi yang seimbang kepada KPM
- c) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi KPM
- d) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- e) Mendorong usaha eceran rakyat

Manfaat program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu sebagai berikut

- a) Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b) Meningkatkan efesiensi penyeluran bantuan sosail
- c) Meningkatkan transaksi Nontunai dalam agenda gerakan nasional Nontunai (GNNT)
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.
- e) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Besaran Manfaat: besaran BPNT adalah Rp.200.000/ KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan dapat ditukarkan dengan barang seperti beras, telur, ayam, kacang hijau, bawang, ayam di agen Ewarung, apabila bantuan tidak dibelanjakan tiga bulan akan hangus. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam program Bantuan Pangan Nontunai berdasarkan tujuan meningkatkan nutrisi keluarga penerima manfaat (KPM).

B. Mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap pertama adalah transfer dana bantuan pangan dan berikutnya notifikasi kepada KPM.

1. Transfer dana bantuan pangan

- a) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM 1 perubahan yang diterima dari kementerian sosial.
- b) Pemindahan bukuan dana bantuan pangan dari rekening kementerian sosial pada Bank penyalur ke akun elektronik bantuan pangan.
- c) Transfer dana bantuan ke akun elektronik bantuan pangan KPM tidak dikenakan biaya.
- d) Aktiva dilakukan melalui system Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan ke akun elektronik

2. Notifikasi kepada KPM

- a) Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke akun elektronik bantuan pangan
- b) Pembelian bahan pangan oleh KPM pada e warung

C. Perlindungan sosial dan bantuan sosial pangan

Pemerintah memiliki beberapa pilihan untuk mengejar pembangunan terkait pangan termasuk dua jenis intervensi. Pertama otoritas publik dapat memilih untuk meningkatkan pasokan pangan baik secara langsung atau tidak langsung. Langkah-langkah langsung akan mencakup intervensi untuk mendukung petani dan infrastruktur petani, langkah-langkah tidak langsung akan mencakup mereka yang mengelola harga termasuk subsidi harga untuk produsen atau perantara yang terlibat pengilangan, transportasi, dan penyimpanan. Mereka juga akan mencakup pengungkit makro seperti kalibrasi nilai tukar, dan penjualan pasar terbuka baik dari impor atau penyimpanan.

Kedua otoritas publik dapat memilih untuk mempengaruhi permintaan, baik melalui langkah langsung atau tidak langsung. Intervensi sisi permintaan atau kadang juga disebut bantuan sosial pangan. Tujuan kemandirian pangan telah menjadi faktor kunci yang menjadi motivasi pendekatan in-kind terhadap ketahanan pangan, seiring waktu banyak negara yang mengubah kebijakan stabilitas harga pangan menjadi program perlindungan sosial yang ditunjukkan langsung pada pengurangan kemiskinan. Evolusi seperti ini hanya akan terjadi dengan perubahan politik reformasi tata pemerintahan dan modifikasi kontrak sosial dan dimungkinkan oleh perubahan teknologi.

Di Indonesia evaluasi kegagalan Rastera telah mengarah pada pengabdian “Kartu Perlindungan Sosial”, yang memungkinkan akses tidak hanya ke subsidi

pangan terati juga ke program-program berbasis uang tunai dana. Data dan kriteria klarifikasi penganean Rastra, sejak 2012 selaras dengan basis data terpadu untuk perlindungan sosial. Pada tahun 2013 rastra menjadi bagian dari program percepatan dan perluasan perlindungan sosial, sebuah program untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan baku, dengan pemerintah memberikan brosur kepada rumah tangga yang berisi lebih lanjut tentang Rastra.

2.2.2 Formulasi kebijakan BPNT sebagai Bantuan sosial pangan di

Indonesia

Pendekatan Indonesia terhadap bantuan sosial pangan secara intrinsik terkait dengan strategi untuk mempertahankan harga pangan domestic yang tinggi. (Alderman, et al2018) dari pada mengatasi volatilitas harga melalui jaringan sosial yang ditargetkan pendekatan secara administrasi tampaknya lebih mudah untuk mengatasi “akar” penyebab ketidakmampuan pangan melalui intervensi hulu di pasar beras dan rantai pasokan.

Dalam hal ini perum BULOG sebuah badan logistic barang, diciptakan pada tahun 1996 dengan mandate yang mirip dengan FCI India, termasuk tanggung jawab untuk mencapai swasembada pangan (beras) dan menggunakan stok untuk memperlancar fluktuasi dalam produksi dan konsumsi. Pada tahun 1998 devaluasi besar besaran terjadi bersamaan dengan pecahnya EL Nino yang berdampak negative bagi pertanian. Dengan biaya melambung tinggi untuk menstabilkan harga. Indonesia di pakai untuk mengadopsi program yang ditargetkan secara eksplisit untuk menyediakan beras bersubsidi kepada rumah

tangga miskin, meskipun menargetkan rumah tangga miskin itu sendiri adalah tujuan yang sulit dicapai.

Program raskin sebelum rastra telah bertahan sebagai jaringan pengaman rumah tangga bahkan ketika Indonesia telah melubcur beberapa skema transfer tunai, skema setelahnya rastra bergerak ke arah skema kupon dengan eksperimen yang sedang berlangsung di 44 kota, dan pada 2019 telah ditingkatkan ke hampir semua 500 kota dan kabupaten diseluruh Indonesia dengan sekitar 15,6 juta penerima manfaat.

2.2.3 Sistem

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, yang terdiri dari subsistem yang 9 mendukung sistem yang lebih besar. Informasi adalah sebuah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi (Romney dan Paul, 2015).

A. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Mulyadi, tujuan sistem akuntansi ada empat diantaranya:

- a) Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yang berfungsi untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi.

- b) Menyediakan informasi berbentuk laporan (hasil) kinerja manajemen perusahaan bagi pengelolaan kegiatan usaha.
- c) Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik informasi mengenai mutu, ketepatan penyajian informasi maupun struktur informasinya.
- d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

B. Elemen-elemen Sistem Informasi Akuntansi Menurut Romney dan Poul sistem informasi akuntansi memiliki lima elemen yaitu:

- a) Orang-orang yang berfungsi untuk mengoperasikan dan melaksanakan sistem dengan berbagai fungsi.
- b) Prosedur yang dilakukan baik secara manual atau otomatis untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktifitasaktifitas suatu organisasi.
- c) Data mengenai sebuah aktifitas yang dilakukan mengenai prosesproses kegiatan organisasi.
- d) Software yang digunakan untuk meproses data organisasi
- e) Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan peralatan yang mendukung dalam pengolahan data dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

2.2.4 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dari bahasa Inggris yang berarti keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat memberikan hak-hak kepada

publik yang berhak untuk tahu, mendapatkan informasi, dan hak untuk didengarkan aspirasinya. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah konsep yang kompleks yang lebih sulit diwujudkan, karena akuntabilitas harus menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (horizontal accountability) yang dapat menggambarkan kinerja.

A. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya pengguna wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada tiga yang membedakan konsep pertanggungjawaban, pertama akuntabilitas (accountability), kedua, tanggungjawab (responsibility) dan ketiga responsivitas (responsiveness). Tanggungjawab merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi Negara dinilai bertanggungjawab apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka

B. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

pada instansi Pemerintahan Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan yang efisien adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

- a) Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b) Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d) Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan
- e) Inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

2.2.5 Indikator Akuntabilitas

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakannya program. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan sendirinya dipenuhi dengan penyampaian informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang

dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

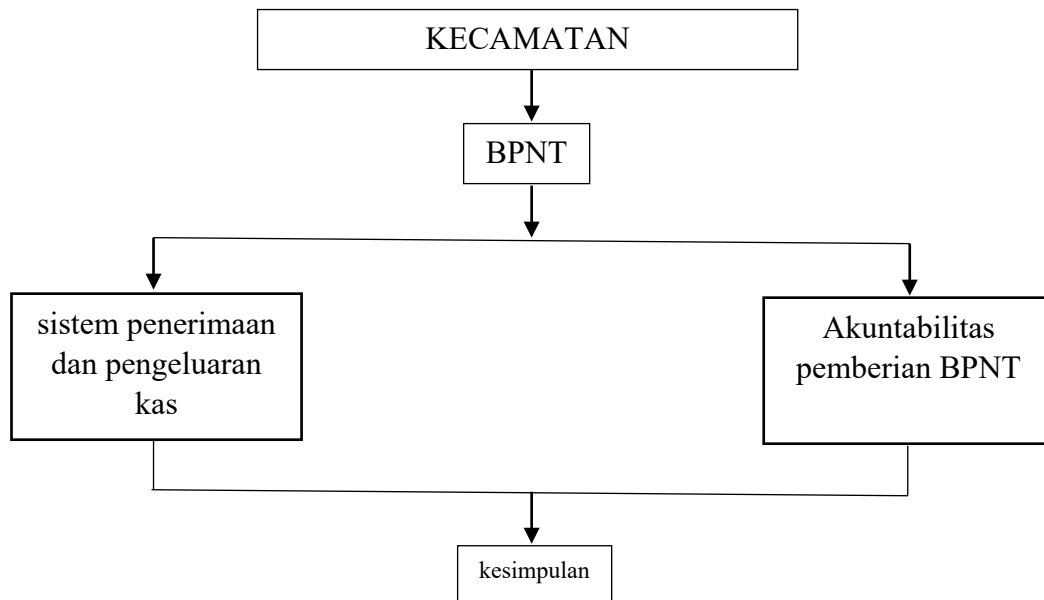
Perangkat Pendukung Indikator

1. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
2. Mekanisme pertanggungjawaban
3. Laporan tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
6. Sistem pengawasan
7. Mekanisme reward and punishment.

2.3 Kerangka Konseptual

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dengan mengurangi beban belanja bulanan dengan mengeluarkan bantuan pangan berdasarkan peraturan menteri sosial republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

(BPNT) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 di kecamatan Bandarkedungmulyo dengan tersalurnya BPNT ada beberapa kendala yang dikemukakan dilapangan yaitudalam penyaluran bantuan pangan tidak tepat sasaran.Untuk mengetahui lenih dalam tentang pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai guna menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) berbasis elektronik melalui kartu kombo di Kecamatan Bandarkedungmulyo. Dari penjelasan diatas maka penulis akan menyederhanakan kerangka berfikir melalui sebuah bagan yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif. istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller (dalam Nasution,1988:23) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Dengan demikian penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa menghimpundata, mengelola data, dan menganalisa data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program yang menjadi penelitian

2.2 Fokus Penelitian

Sugiyono, (2012:32) mengungkapkan fokus penelitian kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah–pisahkan) sehingga penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinterksi secara sinergis. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai prosedur dan implemsntasi program Bantuan Pangan Nontunai berbasis elektronik menggunakan kartu kombo yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo.

1. Sistem akuntansi dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penyaluran dan penerimaan kas Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo